

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam beberapa tahun ini, lingkungan laut menghadapi krisis besar yang diakibatkan oleh peningkatan aktivitas manusia diberbagai negara. Seperti adanya Pertambangan, Pembangkit Tenaga Nuklir, serta lainnya, yang berakibat pada pencemaran laut yakni adanya, Zat Radioaktif, limbah yang tidak diolah, tumpahan minyak mentah, logam berat, pengasaman tanah, eutrofikasi, dan penangkapan ikan berlebih merupakan penyebab utama pencemaran laut (Li M, 2023). Sehingga dengan berbagai pencemaran laut yang terjadi, beberapa diantaranya ada yang disebabkan oleh kecelakaan, kelalaian, atau bahkan bencana alam berskala besar sehingga memberikan dampak yang besar hingga keluar dari wilayah atau negara yang mengalami hal tersebut. Tidak dapat dipungkiri jika hal demikian terjadi, maka dapat mengganggu stabilitas hubungan antar dua negara. (T.Carrier, 2024).

Seperti pada Fenomena tsunami yang terjadi di Jepang pada 11 Maret tahun 2011 yang merupakan peristiwa terbesar sepanjang sejarah. Gempa Bumi Besar Jepang Timur dengan kekuatan 9,1 magnitudo memicu tsunami besar yang melanda wilayah pesisir sejauh lebih dari 400 kilometer dan membanjiri wilayah hingga 5 kilometer ke daratan dan tsunami menyebabkan kecelakaan nuklir pada Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Fukushima Daiichi di Prefektur Fukushima, salah satu pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di dunia. GelombangTsunami mencapai pembangkit listrik tenaga nuklir dalam gelombang setinggi 14 meter, 50 menit setelah gempa pertama membanjiri tembok laut dan merusak sistem pendingin dan kendali, sebanyak tiga dari enam reaktor mengalami ledakan dan kehancuran tahap 7, melepaskan sejumlah besar radioaktif ke lingkungan, serta kontaminasi radioaktif menyebar melalui udara, hujan, debu, sirkulasi air, satwa liar, pembuangan sampah, dan transportasi,

serta mempengaruhi tanah, air, tanaman, hewan, infrastruktur, dan populasi (Hai, 2021).

Kecelakaan nuklir Fukushima (*Fukushima Nuclear Accident*) terjadi karena sistem di pembangkit listrik tenaga nuklir yang mendeteksi gempa bumi dan secara otomatis mematikan reaktor nuklir, lalu generator darurat bertenaga diesel dinyalakan untuk menjaga agar pendingin tetap dipompa di sekitar inti reaktor yang masih sangat panas bahkan setelah reaktor dimatikan. Namun, tidak lama kemudian, gelombang setinggi lebih dari 14 meter menghantam Fukushima. Air membanjiri dinding isolasi, menenggelamkan PLTN dan mematikan generator darurat. Para pekerja dengan cepat memulihkan aliran listrik, tetapi dalam beberapa hari bahan bakar nuklir di tiga reaktor menjadi terlalu panas dan melelehkan sebagian inti reaktor - sebuah peristiwa yang disebut sebagai krisis nuklir. Terdapat pula lebih dari 500.000 ton air limbah yang tidak diolah (termasuk 10.000 ton yang dilepaskan untuk mengosongkan ruang penyimpanan) lolos ke lautan tidak lama setelah kecelakaan. Selain itu, kebocoran yang terus menerus ke dalam air tanah diakui oleh operator pembangkit listrik tenaga nuklir hingga tahun 2013 (BBC NEWS INDONESIA, 2021).

Hingga pada 13 April 2021 Pemerintah Jepang mengisiasi keputusan untuk membuang lebih dari satu juta metrik ton air limbah nuklir Fukushima (FNW) ke laut dikarenakan kapasitas penyimpanannya akan habis dalam waktu dua tahun dan IAEA (*International Atom Energy Agency*) bersama TEPCO (*Tokyo Electric Power Company*) serta pemerintah Jepang menyatakan tindakan pembuangan limbah nuklir tersebut aman dan hanya menimbulkan sedikit risiko bagi manusia dan kehidupan laut (Tessa Wong, 2023). Lalu pada 24 Agustus 2023 Jepang meliriskan pembuangan limbah nuklir ke Samudera Pasifik, dengan memberikan penjelasan bahwa limbah radioaktif tersebut telah diolah dengan sistem pengolahan cairan berteknologi tinggi untuk menghilangkan sebagian besar kontaminan, pemerintah Jepang mengatakan bahwa tingkat akhir tritium - sekitar 1.500 becquerels per liter sehingga jauh lebih aman daripada tingkat yang disyaratkan oleh regulator untuk pembuangan limbah nuklir, atau oleh Organisasi Kesehatan Dunia untuk air minum. Tepco mengatakan bahwa

tingkat karbon-14 juga akan memenuhi standar (Lesley M.M Blume, 2023).

Berbanding terbalik dengan pernyataan pemerintah Jepang, dunia internasional justru dilanda kekhawatiran mengenai keamanan hasil laut Jepang karena limbah nuklir dari Jepang mencapai Pantai Pasifik Amerika Utara dalam waktu 4-5 tahun. Nuklida radioaktif menyebar ke Sebagian besar Laut Cina dalam waktu 2-3 tahun. Sepuluh tahun kemudian, air limbah nuklir yang dibuang dari Fukushima telah mencemari hampir seluruh Samudera Pasifik. Tentu saja permasalahan ini menimbulkan respon yang beragam dari setiap Negara. seperti sebagian besar mitra dagang hasil laut Jepang yakni Cina, Rusia, India, Korea Selatan, memberlakukan larangan sementara terhadap makanan dari beberapa distrik di sekitar Fukushima (Guan & Huang, 2023).

Beberapa negara turut menentang kebijakan Jepang tersebut termasuk pemerintah Cina yang mendesak agar Jepang mengambil pendekatan yang bijaksana dalam pembuangan air limbah nuklir di Fukushima. Pemerintah Korea Selatan mengatakan bahwa langkah ini akan menimbulkan risiko bagi keamanan dan lingkungan laut negara-negara tetangga. Pihak Korea Selatan menyatakan penentangannya terhadap keputusan pemerintah Jepang. "*Daily Mail*" Inggris juga menerbitkan artikel yang menunjukkan bahwa pembuangan air limbah nuklir yang tercemar dalam jumlah besar ke laut tidak diragukan lagi merupakan bencana bagi manusia. Selain itu terkait keputusan Jepang tersebut, terdapat perbedaan sikap yang luas diberbagai negara misalnya, beberapa negara yang memiliki kepentingan menyuarakan dukungan mereka terhadap perilaku pembuangan tersebut (Z. Liu, 2023).

Diantara beberapa negara yang mengecam perilaku Jepang, Cina merupakan negara yang memberikan kecemasan keras dengan keputusan pemerintah Jepang yang melakukan pembuangan limbah nuklir Fukushima ke Samudera Pasifik. Mengingat lokasi pembuangan limbah nuklir tersebut di Samudera Pasifik yang mana wilayah Laut Cina Timur merupakan bagian dari Samudera Pasifik, yang tentu saja hal ini mengganggu hubungan bilateral Jepang-Cina yang dinormalisasi sejak tahun 1972, terlebih Jepang dan Cina sedang dalam perselisihan di Laut Cina Timur yang membuat keputusan Jepang

ini dinilai memperkeruh keadaan sehingga keputusan pelepasan limbah nuklir Fukushima dapat menjadi celah bagi Cina untuk terus meningkatkan kasus ini dan menjalankan kepentingan nasionalnya untuk meningkatkan reputasi Cina di wilayah Laut Cina Timur yang sedang bersengketa dengan Jepang.

Ketegangan antara Cina dan Jepang di Laut Cina Timur berawal ketika sebagian kecil pulau tak berpenghuni di Laut Cina Timur yang disebut Senkaku oleh Jepang dan Diaoyu oleh Cina. Pulau-pulau ini pernah dikuasai oleh Amerika Serikat sebagai bagian dari kependudukannya pasca-Perang Dunia II di Jepang dan baru kembali ke kendali administratif Jepang dengan dikembalikannya Okinawa pada tahun 1971. Ketika Amerika Serikat bersiap untuk mengembalikan kepulauan ini ke Jepang, Republik Rakyat Cina (RRC) dan Taiwan menentang kedaulatan Jepang. Dua tahun sebelumnya, survei geologi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Laut Cina Timur mengungkapkan potensi sumber daya hidrokarbon yang signifikan. Dengan demikian, klaim kedaulatan atas kepulauan tersebut memiliki dimensi historis dan sumber daya (Smith & Mellow, 2013).

Lalu ketegangan hubungan bilateral Cina-Jepang di Laut Cina Timur terus meningkat sejak tahun 2010, ketika sebuah kapal pukat ikan Cina menabrak dua kapal *Japan's Coast Guard* (JCG) di perairan dekat Kepulauan Senkaku/Diaoyu dan Jepang menahan nahkodanya. Meskipun krisis tersebut akhirnya dapat diredakan, sengketa wilayah ini kembali mencuat pada bulan September 2012, ketika Perdana Menteri Jepang Yoshihiko Noda mengumumkan keputusan pemerintahnya untuk membeli tiga dari lima kepulauan tersebut. Pulau-pulau tersebut dimiliki secara pribadi, tetapi gelombang aktivisme baru, termasuk upaya Cina untuk mendarat di pulau-pulau tersebut dan kampanye publik oleh gubernur Tokyo untuk membelinya sendiri, mendorong Yoshihiko Noda untuk mencoba menetralkan tekanan nasionalis. Keputusan tersebut memicu demonstrasi anti-Jepang yang meluas di Cina, yang mengakibatkan kerusakan besar pada perusahaan-perusahaan Jepang yang beroperasi di sana. Hingga akhirnya Cina meredam keributan tersebut, tetapi sejak saat itu Cina berulang kali menyatakan niatnya untuk menegaskan kontrol

administratifnya atas kepulauan yang disengketakan (Smith & Merrow, 2013).

Hingga perkembangan terbaru mengenai ketegangan antar Jepang dan Cina berada dalam kondisi pasukan penjaga pantai Cina melakukan pertemuan dengan anggota parlemen Jepang di perairan yang diklaim oleh kedua negara di Laut China Timur. Kedutaan besar Cina di Tokyo dan media Jepang mengatakan bahwa dari serangkaian perselisihan maritim dengan Cina, saat ini tengah dalam kondisi dimana kapal-kapal Cina mengambil langkah-langkah penegakan hukum yang tidak disebutkan, seperti menurut kedutaan Cina dalam sebuah pernyataan, menambahkan bahwa mereka telah mengajukan protes keras atas apa yang disebutnya “pelanggaran dan provokasi” oleh Jepang di dekat pulau-pulau kecil tak berpenghuni yang disebut sebagai Diaoyu oleh Cina dan disebut sebagai Senkaku oleh Jepang (Reuters, 2024).

Maka dengan demikian, ketegangan maritim di Laut Cina Timur yang melatar belakangnya, Pemerintah Cina mengajukan pemberitahuan tindakan darurat kepada WTO (G/SPS/N/CHN/1283) yang berisikan untuk sepenuhnya melindungi dari risiko kontaminasi radioaktif terhadap keamanan pangan yang disebabkan oleh pembuangan air yang terkontaminasi nuklir dari Fukushima di Jepang, untuk melindungi kesehatan konsumen Cina dan memastikan keamanan pangan impor dan hal ini dilakukan Cina sebagai Gerakan atau tindakan preventif (WTO, 2023).

Sehingga pada 24 Agustus tahun 2023 melalui keputusan yang di umumkan oleh Administrasi Umum Bea Cukai No.103 tahun 2023 menyatakan, untuk mencegah secara komprehensif risiko kontaminasi radioaktif terhadap keamanan pangan yang disebabkan oleh pembuangan air yang terkontaminasi nuklir dari Fukushima yang dibuang Jepang ke laut, untuk melindungi kesehatan konsumen di Cina, dan untuk memastikan keamanan makanan impor, sesuai dengan “Undang-Undang Keamanan Pangan Republik Rakyat Cina” dengan ketentuan yang relevan dari "Langkah-langkah Manajemen Keamanan Pangan Ekspor" dan "Perjanjian tentang Penerapan Tindakan Sanitasi dan Fitosanitasi" dari Organisasi Perdagangan Dunia (FAS China Staff, 2023).

Dari keputusan Cina yang melakukan pembatasan ekspor hasil laut Jepang tersebut, membuat Jepang mengambil sikap akan hal yang pada awalnya hanya dengan menyerukan pencabutan larangan tersebut dengan segera. Perdana Menteri Kishida dan para pemimpin senior pemerintah lainnya serta partai-partai yang berkuasa dan oposisi menunjukkan perlunya pemerintah Cina menyajikan bukti ilmiah untuk menjustifikasi tindakan tersebut. Beberapa pejabat pemerintah menyerukan resolusi diplomatik, sementara yang lain mengusulkan agar diadakan diskusi yang tidak memihak di antara para ahli. Akan tetapi para ahli mengusulkan agar Jepang mengajukan prosedur penyelesaian sengketa ke WTO terkait kasus ini (Tsuyoshi, 2023).

Sehingga pemerintah Jepang pada 4 September 2023 mengajukan kontra argumen kepada WTO (*World Trade Organization*) terhadap tindakan yang dilakukan oleh Cina. Melalui surat edaran G/SPS/GEN/1233/Rev.6/Add.1 menyatakan bantahannya secara tertulis kepada WTO, menjelaskan keamanan pembuangan air limbah nuklir dengan metode olahan ALPS (*Advanced Liquid Processing System*) yang merupakan tahap pemurnian dari air yang terkontaminasi untuk memenuhi standar peraturan dengan pengecualian tritium ke laut, termasuk melalui hasil pemantauan setelah dimulainya pembuangan, dan menyatakan bahwa penangguhan impor yang dilakukan oleh Cina sama sekali tidak dapat diterima, dan bahwa Jepang sangat mendesak Cina untuk segera mencabut tindakannya. Jepang terus mendesak Cina untuk segera mencabut tindakan pembatasan impornya, selain pengajuan *counterargument*, Jepang juga akan terus memberikan penjelasan mengenai posisinya di komite-komite terkait di WTO (Committee on Sanitary and Phytosanitary Measures, 2023).

Langkah Jepang tersebut tidak lain sebagai bentuk respon atas pembatasan hingga pemutusan kerja sama perdagangan hasil laut yang dilakukan Cina terhadap Jepang yang berimbas pada industri perdagangan perikanan Jepang. Menurut statistik perdagangan Jepang, total ekspor makanan (termasuk produk laut olahan) ke Cina pada bulan Juli turun 24% dari bulan yang sama tahun lalu, menunjukkan bahwa pembatasan tersebut telah

membebani penjualan. Statistik dari Administrasi Umum Bea Cukai Cina juga mengindikasikan bahwa Cina mengimpor ikan dan produk laut lainnya senilai 234 juta yuan (\$32 juta) dari Jepang pada bulan Juli telah turun 29% dari tahun sebelumnya. Yang mana dengan dampak tersebut para petinggi pemerintah Jepang berasumsi bahwa Cina melakukan hal tersebut sebagai tindakan provokasi untuk melemahkan Jepang dalam ketegangan di Laut Cina Timur (Kawasaki Nitsumi, Ishikawa Chihiro, 2023).

Maka berdasarkan latar belakang serta permasalahan yang telah dipaparkan, penulis mengangkat fenomena ini menjadi sebuah penelitian yang berjudul **“Implikasi keputusan pembuangan limbah nuklir Fukushima terhadap eskalasi ketegangan hubungan bilateral Jepang-Cina”**

1.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah dapat diajukan guna mempermudah proses analisis terkait permasalahan yang sedang diteliti. Berdasarkan uraian identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang telah disampaikan di atas, maka dapat diperoleh pertanyaan penelitian yakni:

“Bagaimana keputusan pembuangan limbah nuklir Fukushima dapat meningkatkan reputasi Cina ditengah ketegangan hubungan bilateral dengan Jepang”

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah penulis paparkan, maka penulis perlu membatasi masalah agar pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus pada sesuatu hal yang sangat penting dalam mendekati pada pokok permasalahan yang akan dibahas. Hal ini agar tidak terjadi kerancuan ataupun kesimpangsiuran dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Ruang lingkup penelitian dimaksudkan sebagai penegasan mengenai batasan-batasan objek.

Penelitian ini difokuskan pada analisis keputusan pembuangan limbah nuklir Fukushima ke Samudera Pasifik pada 2023 dan telah direncanakan sejak tahun 2021, yang berimbas kepada hubungan Jepang-Cina ditengah isu ketegangan hubungan bilateral keduanya di Wilayah Laut Cina Timur, yang berlanjut pada pemberhentian kerja sama hasil laut yang dilakukan oleh Cina pada 24 Agustus 2023, dengan sebuah pernyataan pemerintah Cina yang berdalih bahwa keputusan Jepang tersebut dapat merusak ekosistem laut dan mengancam keamanan budidaya perikanan di Laut Cina Timur yang sedang dimulai oleh Cina, yang mana permasalahan ini berlanjut dengan ketegangan di WTO (*World Trade Organization*) karena Jepang melayangkan kontra argumen di forum WTO.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis sebab dari keputusan pemerintah Jepang membuang limbah nuklir Fukushima ke laut.
2. Mengetahui bagaimana hubungan bilateral Jepang-Cina.
3. Mengetahui bagaimana masalah pembuangan limbah nuklir Fukushima dapat meningkatkan ketegangan hubungan bilateral Jepang-Cina di Laut Cina Timur.
4. Menganalisis bagaimana respon Cina terhadap keputusan pembuangan limbah nuklir Fukushima.

1.5 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, adapun kegunaan penelitian ini terbagi menjadi dua yakni, kegunaan teoritis dan praktis:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Peneliti berharap skripsi ini dapat ikut berkontribusi terhadap pengembangan keilmuan Prodi Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Pasundan.
 - b. Sebagai sumber referensi salah satu isu Hubungan Internasional terkait

dampak pembuangan limbah nukliir Fukushima terhadap hubungan bilateral Jepang-Cina

2. Kegunaan Praktis

- a. Peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bacaan dan pengetahuan bagi mahasiswa dan Masyarakat pada umumnya, mengenai pembuangan limbah nuklir Fukushima ke Samudera Pasifik terhadap hubungan bilateral Jepang-Cina serta kenaikan tensi isu ketegangan di Laut Cina Timur, yang berlanjut pada pemutusan kerja sama perdagangan hasil laut yang dilakukan oleh Cina hingga berlanjut pada ketegangan hubungan Jepang-Cina di WTO (*World Trade Organization*) dengan saling melayangkankan kontra argument.
- b. Sebagai prasyarat kelulusan mata kuliah skripsi dalam program studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Pasundan.